

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Dosen Pembimbing



Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis

Surabaya, 27 Oktober 2021

No. : 723/IL3.AU/A/FE/2021

Lamp. :-

Hal : Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping

Kepada Yth:

1. Andrianto, SE, M.Ak
2. Rieska Maharani, SE, MM  
Di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan penulisan skripsi, sebagai mana diatur dalam :

1. Peraturan Rektor no : 566.1 /PRN/IL3.AU.F/2014 – 03.09.2014, tentang pedoman Akademik Tahun 2014/2015 Universitas Muhammadiyah Surabaya, perihal penilaian hasil belajar point 4.5 (Tugas Akhir)
2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi UMSurabaya No : 68/ IL3.AU/A/Fak. Ekonomi/IX/2013 Tentang Pedoman Akademik Pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana (S-1), Bab IV Point C.4 (Prosedur Penilaian Skripsi).

Maka dimohon perkenannya untuk menjadi pembimbing terhadap mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Qori Mastuti  
Nim : 20181220001  
Prodi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada CV.Kurnia Adi Perkasa Surabaya

Pembimbing Utama : Andrianto, SE, M.Ak  
Pembimbing Pendamping : Rieska Maharani, SE, MM

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terimakasih

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Kaprodi Akuntansi,  
  
Zeni Rusmawati., S.Pd., M.Pd

Tembusan Yth, (Tanpa Lampiran):

1. Dekan
2. Kaprodi Akuntansi
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan

## Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian dari Universitas



Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis

Surabaya, 04 Juli 2023

Nomor : 214/II.3.AU/FEB/A/2023  
Lamp : -  
Hal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI**

Kepada :  
Yth. Pimpinan CV. Kurnia Adi Perkasa  
Margomulyo Permai Blok AH-33, Asemrowo, Asemrowo Surabaya Jawa Timur

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT.

Kami selaku Dekan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya mengajukan permohonan agar mahasiswa kami dengan identitas dibawah ini mendapatkan kesempatan untuk mengadakan penelitian di Lembaga/Institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun maksud dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh informasi/data sesuai dengan judul skripsi yang telah kami setujui.

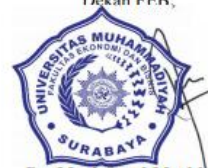
Identitas mahasiswa yang akan meneliti :

Nama/NIM : Qori Mastuti / 20181220001  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Alamat : Jl. Pacarkembang 3 No. 93 Belakang, Pacarkembang Tambaksari Surabaya  
No. Handphone : 085608183381  
Judul Skripsi : "Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya."

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya disampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dekan FFR,



Dr. Mochamad Mochlis, S.Si., MM

Morality, Intellectuality and Entrepreneurship

FAKULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS HUKUM DAN ILMU PENDIDIKAN | FAKULTAS TEKNIK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya  
Provinsi Jawa Timur, Indonesia 60113  
www.um-surabaya.ac.id

CONTACT

phone : 031 3811966  
fax : 031 3813096  
email : rektorat@um-surabaya.ac.id

Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Perusahaan



**CV. KURNIA ADI PERKASA**  
**MARGOMULYO PERMAIAH-33, SURABAYA – INDONESIA**  
**Email : [kurniaadiperkasa@gmail.com](mailto:kurniaadiperkasa@gmail.com)**

**SURAT BALASAN**

Nomor : KAP-HRD / 001 / VII / 2023

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penelitian untuk skripsi No. 214/II.3.AU/FEB/A/2023 Tanggal 04 Juli 2023 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Qori Mastuti

Nim : 20181220001

Prodi : S1 Akuntansi

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya dengan Judul skripsi : Analisa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada CV. Kurnia Adi Perkasa.

Demikian surat balasan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juli 2023  
Direktur Utama

(Kurniawan Cahyadi)

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

**Kartu Kendali Bimbingan Skripsi**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Tahun semester	: Ganjil 2021/2022	Prodi	: S1 Akuntansi
NIM	: 20181220001	Pembimbing 1	: MA'RUF SYA'BAN
Nama Mahasiswa	: QORRI MASTUTI	Pembimbing 2	: Reska Maharani

No.	Tanggal	Topik	Saran / Komentar	Pemimbing
1	2022-06-08	Konsultasi Bab 1-0	Revisi terkait tata aturan penulisan skripsi pada bab 1 dan 2	MA'RUF SYA'BAN
2	2022-07-04	Konsultasi Bab 1-2	Revisi pada bab 1 terkait latar belakang masalah	MA'RUF SYA'BAN
3	2022-07-07	Konsultasi Bab 1-2	Langkah untuk penulisan bab 3 dan revisi terkait tata aturan penulisan pada bab 2	MA'RUF SYA'BAN
4	2022-08-03	Konsultasi bab 1	Dijelaskan lagi terkait latar belakang masalah apa yang akan di bahas	Reska Maharani
5	2022-12-22	Konsultasi bab 1	Ada revisi terkait rumusan masalah dan tujuan masalah	Reska Maharani
6	2023-01-24	Konsultasi Bab 1-0	Revisi pada landasan teori terkait pembahasan tentang apa yang harus dibuangkan terlebih dahulu	Reska Maharani
7	2023-02-20	Konsultasi Bab 1-0	Revisi sumber teori yang digunakan serta kerangka berpikir	Reska Maharani
8	2023-03-08	Konsultasi Bab 1-2	Revisi terkait penulisan dan lanjut ke bab 3	Reska Maharani
9	2023-03-27	Konsultasi bab 1-3	Revisi pada bab 3 terkait pengumpulan data, dan penambahan daftar rujukan	Reska Maharani
10	2023-04-04	Konsultasi bab 1-3	Perandatangani lembar pengesahan proposal skripsi dan dipersiapkan untuk mendaftarkan diri mengikuti ujian sempro	Reska Maharani
11	2023-04-06	Konsultasi bab 1-3	Revisi terkait penulisan pada bab 3	MA'RUF SYA'BAN
12	2023-04-11	Konsultasi bab 1-3	Perandatangani lembar pengesahan proposal skripsi dan dipersiapkan untuk mendaftarkan diri mengikuti ujian sempro	MA'RUF SYA'BAN
13	2023-07-05	Konsultasi setelah sempro	Mengajukan terkait adanya revisi pada bab 1 setelah sempro	MA'RUF SYA'BAN
14	2023-07-07	Konsultasi Bab 4-5	Ada revisi terkait tata letak dan penulisan yg ada di Bab 4	Reska Maharani
15	2023-07-07	Konsultasi bab 4-5	Ada revisi terkait penulisan, serta untuk melengkapi dokumen skripsi	MA'RUF SYA'BAN
16	2023-07-07	Konsultasi setelah sempro	Revisi terkait bab 1 untuk disamakan atas rumusan masalah dengan tujuan masalah, serta penambahan literatur	Reska Maharani
17	2023-07-10	Konsultasi Bab 4-5	Adanya revisi terkait penulisan pada bab 4 serta dilengkapi dokumen penyerta lainnya	Reska Maharani
18	2023-07-11	Konsultasi bab 4-5	Acc atas bab 4-5 serta Perandatangani terkait persetujuan ujian	Reska Maharani
19	2023-07-11	Konsultasi Bab 6-5	Acc atas bab 6-5 serta Perandatangani terkait persetujuan ujian skripsi untuk proses pendaftaran ulang skripsi	MA'RUF SYA'BAN

Lampiran 5: Surat Keterangan Bukti Plagiasi



Perpustakaan



**SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI**

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis\*) yang diserahkan atas :

N a m a : Qori Mastuti  
N I M : 20181220001  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi (S1) Akuntansi  
Alamat : Desa Kawistolegi RT.001 RW.004 Kel. Kawistolegi Kec.Karanggeneng  
Kab.Lamongan  
Judul : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight forwarding Pada  
CV. Kumia Adi Perkasa  
telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan

Putri Rokhmawati

Surabaya, 31 Juli 2023  
Mahasiswa,

Qori Mastuti

Mengetahui,  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Yamo, M.Pd.

**\*) DILARANG KERAS MENYEBARLUASKAN FORM INI**

Lampiran 6 : Endorsement Letter



**ENDORSEMENT LETTER**  
614/PB-UMS/EL/VII/2023

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Income Tax Analysis in Article 23 for Freight Forwarding Services  
at CV. Kurnia Adi Perkasa  
Student's name : Qori Mastuti  
Student's ID Number : 20181220001  
Department : Accounting, Undergraduate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Surabaya Indonesia

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, July 27, 2023  
Chair person,

Dr. Waode Hamsia, M.Pd

Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Revisi Skripsi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
JL. Sutorejo No. 59 Surabaya

PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Qori Mastuti

Noreg Mahasiswa : 20181220001

Jurusan : Akuntansi

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023

Kami telah menyetujui perbaikan revisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas :

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Muchlis, SE., M.MT		28-7-2023
Ma'ruf Syaban, ST., SE., M.Ak		31-07-2023
Rieska Maharani, SE., MM		8 8 2023

Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap

Lampiran 8 : Penyerahan Surat Ijin Penelitian Dengan Kepala HRD



Lampiran 9 : Penyerahan Data Laporan Pajak Dengan Staff Accounting and Tax





Lampiran 10 : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

No	Nama Perusahaan	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	July	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	PT Mitra Samudra Abadi	17.900.000	22.850.000			17.468.750		30.109.056		12.640.306		12.746.962	12.241.962	125.957.036
3	PT. Sedati Agung Abadi					4.925.000		9.664.300		4.739.300		4.633.700	5.133.700	29.096.000
4	PT. Artha Samudra Kontindo					370.000								370.000
5	PT. Multi Bina Pura International							430.001		430.001		430.001	430.001	1.720.004
7	PT. Sucofindo											2.072.650		2.072.650
8	PT. Surveyor Indonesia											2.072.650		2.072.650

Lampiran 11: Bukti Penerimaan Negara masa Januari – Desember 2021

<b>BANK CENTRAL ASIA, TBK.</b>		<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b>		<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>
		<b>PENERIMAAN PAJAK</b>		
<b>DATA PEMBAYARAN</b>				
TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/02/2021 16:36:26	NTB	:	000042618165
TANGGAL BUKU	: 11/02/21	NTPN	:	C4AF91PHME0JL3KU
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	:	618207
<b>DATA SETORAN</b>				
KODE BILLING	: 024971873980062			
NPWP	: 839184603-614-000			
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA			
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA			
NOMOR OBJEK PAJAK	:			
MATA ANGGARAN	: 411124			
JENIS SETORAN	: 104			
MASA PAJAK	: 01-01-2021			
NO KETETAPAN	: 000000000000000			
JUMLAH SETORAN	: 358,000.00	MATA UANG	:	IDR
TERBILANG	: TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU			

This is computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

<b>BANK CENTRAL ASIA, TBK.</b>		<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b>		<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>
		<b>PENERIMAAN PAJAK</b>		
<b>DATA PEMBAYARAN</b>				
TANGGAL & JAM BAYAR	: 19/03/2021 10:16:19	NTB	:	000043714622
TANGGAL BUKU	: 19/03/21	NTPN	:	BBCBD3ICP4BSDO1G
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	:	714665
<b>DATA SETORAN</b>				
KODE BILLING	: 025076244996144			
NPWP	: 839184603-614-000			
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA			
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA			
NOMOR OBJEK PAJAK	:			
MATA ANGGARAN	: 411124			
JENIS SETORAN	: 104			
MASA PAJAK	: 02-02-2021			
NO KETETAPAN	: 000000000000000			
JUMLAH SETORAN	: 457,000.00	MATA UANG	:	IDR
TERBILANG	: EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU			

This is computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR : 09/06/2021 17:12:20 NTB : 000046081640  
TANGGAL BUKU : 10/06/21 NTPN : 0B4AD80GHB2LJ3P7  
KODE CABANG BANK : 000206 STAN : 081686

**DATA SETORAN**

KODE BILLING : 025387457253159  
NPWP : 839184603-614-000  
NAMA WAJIB PAJAK : KURNIA ADI PERKASA  
ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA  
NOMOR OBJEK PAJAK :  
MATA ANGGARAN : 411124  
JENIS SETORAN : 104  
MASA PAJAK : 05-05-2021  
NO KETETAPAN : 000000000000000  
JUMLAH SETORAN : 349,375.00 MATA UANG : IDR  
TERBILANG : TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR : 09/06/2021 17:12:19 NTB : 000046081638  
TANGGAL BUKU : 10/06/21 NTPN : 372183ID266OC8JG  
KODE CABANG BANK : 000206 STAN : 081684

**DATA SETORAN**

KODE BILLING : 025387458110064  
NPWP : 839184603-614-000  
NAMA WAJIB PAJAK : KURNIA ADI PERKASA  
ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA  
NOMOR OBJEK PAJAK :  
MATA ANGGARAN : 411124  
JENIS SETORAN : 104  
MASA PAJAK : 05-05-2021  
NO KETETAPAN : 000000000000000  
JUMLAH SETORAN : 7,400.00 MATA UANG : IDR  
TERBILANG : TUJUH RIBU EMPAT RATUS

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 17/06/2021 13:44:50	NTB	: 000046359976
TANGGAL BUKU	: 17/06/21	NTPN	: 364095B81S94LAQI
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 360022

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025388451507026		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 05-05-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 98,500.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/08/2021 11:03:52	NTB	: 000047577114
TANGGAL BUKU	: 10/08/21	NTPN	: 86EA880GNCKICQFB
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 577161

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025595290053099		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 07-07-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 98,500.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR : 10/08/2021 11:03:51 NTB : 000047577111  
TANGGAL BUKU : 10/08/21 NTPN : 3CA107437I26L410  
KODE CABANG BANK : 000206 STAN : 577158

**DATA SETORAN**

KODE BILLING : 025595290751008  
NPWP : 839184603-614-000  
NAMA WAJIB PAJAK : KURNIA ADI PERKASA  
ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA  
NOMOR OBJEK PAJAK :  
MATA ANGGARAN : 411124  
JENIS SETORAN : 104  
MASA PAJAK : 07-07-2021  
NO KETETAPAN : 000000000000000  
JUMLAH SETORAN : 7,400.00 MATA UANG : IDR  
TERBILANG : TUJUH RIBU EMPAT RATUS

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR : 10/08/2021 10:51:22 NTB : 000047574814  
TANGGAL BUKU : 10/08/21 NTPN : D30E12LVOD6P4L71  
KODE CABANG BANK : 000206 STAN : 574861

**DATA SETORAN**

KODE BILLING : 025595308070113  
NPWP : 839184603-614-000  
NAMA WAJIB PAJAK : KURNIA ADI PERKASA  
ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA  
NOMOR OBJEK PAJAK :  
MATA ANGGARAN : 411124  
JENIS SETORAN : 104  
MASA PAJAK : 07-07-2021  
NO KETETAPAN : 000000000000000  
JUMLAH SETORAN : 252,806.00 MATA UANG : IDR  
TERBILANG : DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS ENAM

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

<b>BANK CENTRAL ASIA, TBK.</b>	<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK</b>	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>
<b>DATA PEMBAYARAN</b>		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/08/2021 10:51:24	NTB : 000047574824
TANGGAL BUKU	: 10/08/21	NTPN : AE6AD1PISIKDF461
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN : 574871
<b>DATA SETORAN</b>		
KODE BILLING	: 025595308839122	
NPWP	: 839184603-614-000	
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA	
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAIAH - KOTA SURABAYA	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	: 411124	
JENIS SETORAN	: 104	
MASA PAJAK	: 07-07-2021	
NO KETETAPAN	: 0000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 8.600.00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: DELAPAN RIBU ENAM RATUS	

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

<b>BANK CENTRAL ASIA, TBK.</b>	<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK</b>	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>
<b>DATA PEMBAYARAN</b>		
TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/08/2021 10:51:25	NTB : 000047574833
TANGGAL BUKU	: 10/08/21	NTPN : D5FC567LNNGL8J5
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN : 574880
<b>DATA SETORAN</b>		
KODE BILLING	: 025595310056037	
NPWP	: 839184603-614-000	
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA	
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAIAH - KOTA SURABAYA	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	: 411124	
JENIS SETORAN	: 104	
MASA PAJAK	: 07-07-2021	
NO KETETAPAN	: 0000000000000000	
JUMLAH SETORAN	: 94.786.00	MATA UANG : IDR
TERBILANG	: SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM	

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/08/2021 11:03:53	NTB	: 000047577117
TANGGAL BUKU	: 10/08/21	NTPN	: 499C81P18JDOESEU
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 577164

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025595286811102		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 07-07-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 349,375.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA		

This is computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 09/10/2021 18:41:14	NTB	: 000049213403
TANGGAL BUKU	: 11/10/21	NTPN	: AC7491PIBNU6B3I
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 213452

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025704108797042		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 09-09-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 8,600.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DELAPAN RIBU ENAM RATUS		

This is computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 09/10/2021 17:59:18	NTB	: 000049212914
TANGGAL BUKU	: 11/10/21	NTPN	: 16DA24EQR7M2NHCJ
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 212963

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025704109131155		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAIAH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 09-09-2021		
NO KETETAPAN	: 00000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 252.806.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS ENAM		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 09/10/2021 19:02:06	NTB	: 000049213627
TANGGAL BUKU	: 11/10/21	NTPN	: 6AE844EQR7M2VK57
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 213676

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025704109396135		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAIAH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 09-09-2021		
NO KETETAPAN	: 00000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 94.786.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/11/2021 13:47:11	NTB	: 000050110629
TANGGAL BUKU	: 11/11/21	NTPN	: 02C5A5B8E403RG92
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 110679

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025809055564066		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 10-10-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 41,453.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: EMPAT PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH TIGA		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/11/2021 13:47:12	NTB	: 000050110639
TANGGAL BUKU	: 11/11/21	NTPN	: C97570T4UV48UKCF
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 110689

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025809058845071		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 10-10-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 41,453.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: EMPAT PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH TIGA		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/12/2021 12:06:03	NTB	: 000051006480
TANGGAL BUKU	: 10/12/21	NTPN	: B1C9C0T522JQOVAJ
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 006531

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025915881291091		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 11-11-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 8,600.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DELAPAN RIBU ENAM RATUS		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/12/2021 09:54:29	NTB	: 000050972125
TANGGAL BUKU	: 10/12/21	NTPN	: 6734F00NI81BQBT8
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 972175

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025915878617000		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 11-11-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 92,674.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.****BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK****KEMENTERIAN KEUANGAN****DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/12/2021 09:54:28	NTB	: 000050972119
TANGGAL BUKU	: 10/12/21	NTPN	: 0EAF25B8H7FL20CQ
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 972169

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 025915877360026		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 11-11-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 254,939.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN		

This is computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.****BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK****KEMENTERIAN KEUANGAN****DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR	: 10/01/2022 18:20:47	NTB	: 000051980280
TANGGAL BUKU	: 11/01/22	NTPN	: 26E4F2M04SV93BQL
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 980331

**DATA SETORAN**

KODE BILLING	: 026024553099093		
NPWP	: 839184603-614-000		
NAMA WAJIB PAJAK	: KURNIA ADI PERKASA		
ALAMAT	: JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA		
NOMOR OBJEK PAJAK	:		
MATA ANGGARAN	: 411124		
JENIS SETORAN	: 104		
MASA PAJAK	: 12-12-2021		
NO KETETAPAN	: 000000000000000		
JUMLAH SETORAN	: 8,600.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DELAPAN RIBU ENAM RATUS		

This is computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**                      **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**                      **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**PENERIMAAN PAJAK**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR                      : 10/01/2022 18:20:45                      NTB                      : 000051980279  
TANGGAL BUKU                      : 11/01/22                      NTPN                      : 8E6501PIL2CPB19A  
KODE CABANG BANK                      : 000206                      STAN                      : 980330

**DATA SETORAN**

KODE BILLING                      : 026024549582122  
NPWP                      : 839184603-614-000  
NAMA WAJIB PAJAK                      : KURNIA ADI PERKASA  
ALAMAT                      : JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA  
NOMOR OBJEK PAJAK                      :  
MATA ANGGARAN                      : 411124  
JENIS SETORAN                      : 104  
MASA PAJAK                      : 12-12-2021  
NO KETETAPAN                      : 0000000000000000  
JUMLAH SETORAN                      : 244,839.00                      MATA UANG                      : IDR  
TERBILANG                      : DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**BANK CENTRAL ASIA, TBK.**                      **BUKTI PENERIMAAN NEGARA**                      **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**PENERIMAAN PAJAK**

**DATA PEMBAYARAN**

TANGGAL & JAM BAYAR                      : 10/01/2022 18:20:48                      NTB                      : 000051980281  
TANGGAL BUKU                      : 11/01/22                      NTPN                      : FDF7C2M04SV7346L  
KODE CABANG BANK                      : 000206                      STAN                      : 980332


**DATA SETORAN**

KODE BILLING                      : 026024550994133  
NPWP                      : 839184603-614-000  
NAMA WAJIB PAJAK                      : KURNIA ADI PERKASA  
ALAMAT                      : JL. MARGOMULYO PERMAI AH - KOTA SURABAYA  
NOMOR OBJEK PAJAK                      :  
MATA ANGGARAN                      : 411124  
JENIS SETORAN                      : 104  
MASA PAJAK                      : 12-12-2021  
NO KETETAPAN                      : 0000000000000000  
JUMLAH SETORAN                      : 102,674.00                      MATA UANG                      : IDR  
TERBILANG                      : SERATUS DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH EMPAT

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 12 : SPT Induk Masa Januari – Desember 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	<b>FORMULIR 1724 INDUK</b> area barcode JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disisi oleh petugas) <u>0</u> H.5
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 01 - 2021	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal    H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.4	

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP :	83 918 460 3 614 000
A.2 NAMA :	KURNIA ADI PERKASA
A.3 ALAMAT :	JL. MARGOMULYO PERMAIAH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -
A.4 NO. TELEPON :	0831-7482375
A.5 EMAIL :	kurniaadiperkasa@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		17.900.000,00	358.000,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 6)		17.900.000,00	358.000,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			358.000,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBTULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSILN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D. 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBTULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	1	lembar
C.2	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti	1	lembar
C.3	<input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.4	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		lembar
C.5	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas		lembar
C.6	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili		lembar
C.7	<input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat		


**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah
D.2	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
D.3	NAMA KURNIAWAN CAHYADI	
D.4	NPWP 06 788 078 1 605 000	
D.5	TANGGAL 19 02 2021	
D.6	TEMPAT KOTA SURABAYA	

Lampiran : SPT Induk Masa Februari 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <b>02 - 2021</b>		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		H.4
H.5		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disi oleh petugas)		0

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : **83 918 460 3 614 000**

A.2 NAMA : **KURNIA ADI PERKASA**

A.3 ALAMAT : **JL. MARGOMULYO PERMAIAH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -**

A.4 NO. TELEPON : **0831-7482375** A.5 EMAIL : **kurniaadiperkasa@gmail.com**

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		22.850.000,00	457.000,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		22.850.000,00	457.000,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			457.000,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input type="text" value="1"/>	lembar
C.2	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti	<input type="text" value="1"/>	lembar
C.3	<input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan	<input type="text" value=""/>	lembar
C.4	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input type="text" value=""/>	lembar
C.5	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas	<input type="text" value=""/>	lembar
C.6	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili	<input type="text" value=""/>	lembar
C.7	<input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat	<input type="text" value=""/>	

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1  WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)  
 D.2  KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA : **KURNIAWAN CAHYADI**

D.4 NPWP : **06 788 078 1 605 000**


D.5 TANGGAL : **19 03 2021**

D.6 TEMPAT : **KOTA SURABAYA**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Lampiran : SPT Induk Masa Mei 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		area barcode	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 05 - 2021	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal	H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-	H.4 JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disisi oleh petugas) 0 H.5	

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : 83 918 460 3 614 000

A.2 NAMA : KURNIA ADI PERKASA

A.3 ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAI AH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -

A.4 NO. TELEPON : 0831-7482375 A.5 EMAIL : kurniaadiperkasa@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		22.763.750,00	455.275,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		22.763.750,00	455.275,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			455.275,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSILJIN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	3	lembar
C.2	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti	3	lembar
C.3	<input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.4	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		lembar
C.5	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas		lembar
C.6	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili		lembar
C.7	<input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat		


**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah
D.2	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
D.3	NAMA KURNIAWAN CAHYADI	
D.4	NPWP 06 788 078 1 605 000	
D.5	TANGGAL 17 06 2021	
D.6	TEMPAT KOTA SURABAYA	

Lampiran : SPT Induk Masa July 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <b>07 - 2021</b>		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		H.4
H.5		H.5		H.5

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : **83 918 460 3 614 000**

A.2 NAMA : **KURNIA ADI PERKASA**

A.3 ALAMAT : **JL. MARGOMULYO PERMAI AH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -**

A.4 NO. TELEPON : **0831-7482375** A.5 EMAIL : **kurniaadiperkasa@gmail.com**

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		40.573.357,00	811.467,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		40.573.357,00	811.467,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			811.467,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIJIL DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 **6** lembar

C.2  Surat Setoran Pajak/Bukti **6** lembar

C.3  Bukti Pemindahbukuan **6** lembar

C.4  Surat Kuasa Khusus **6** lembar

C.5  Fotokopi Surat Keterangan Bebas **6** lembar

C.6  Fotokopi Surat Keterangan Domisili **6** lembar

C.7  Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1  WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2  KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA **KURNIAWAN CAHYADI**

D.4 NPWP **06 788 078 1 605 000**

D.5 TANGGAL **13 08 2021**


D.6 TEMPAT **KOTA SURABAYA**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah



Lampiran : SPT Induk Masa September 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		area barcode	
Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 09 - 2021	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal	H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-	H.4	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disi oleh petugas) 0 H.5

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : 83 918 460 3 614 000

A.2 NAMA : KURNIA ADI PERKASA

A.3 ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAI AH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -

A.4 NO. TELEPON : 0831-7482375 A.5 EMAIL : kurniaadiperkasa@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		22.355.062,00	447.101,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		22.355.062,00	447.101,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			447.101,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIJIL DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26	4	lembar
C.2	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak/Bukti	4	lembar
C.3	<input type="checkbox"/> Bukti Pemindahbukuan		lembar
C.4	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		lembar
C.5	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Bebas		lembar
C.6	<input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Keterangan Domisili		lembar
C.7	<input type="checkbox"/> Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat		


**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah
D.2	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	
D.3	NAMA KURNIAWAN CAHYADI	
D.4	NPWP 06 788 078 1 605 000	
D.5	TANGGAL 11 10 2021	
D.6	TEMPAT KOTA SURABAYA	

Lampiran : SPT Induk Masa Oktober 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 10 - 2021		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		H.4
H.5		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disi oleh petugas) 0		H.5

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : 83 918 460 3 614 000

A.2 NAMA : KURNIA ADI PERKASA

A.3 ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAIAH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -

A.4 NO. TELEPON : 0831-7482375 A.5 EMAIL : kurniaadiperkasa@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		4.145.300,00	82.906,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		4.145.300,00	82.906,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			82.906,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 2 lembar

C.2  Surat Setoran Pajak/Bukti 2 lembar

C.3  Bukti Pemindahbukuan 1 lembar

C.4  Surat Kuasa Khusus 1 lembar

C.5  Fotokopi Surat Keterangan Bebas 1 lembar

C.6  Fotokopi Surat Keterangan Domisili 1 lembar

C.7  Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1  WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2  KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA : KURNIAWAN CAHYADI

D.4 NPWP : 06 788 078 1 605 000


D.5 TANGGAL : 17 11 2021

D.6 TEMPAT : KOTA SURABAYA

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Lampiran : SPT Induk Masa November 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 <b>12 - 2021</b>		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		H.4
H.5		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disisi oleh petugas) <b>0</b>		H.5

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : **83 918 460 3 614 000**

A.2 NAMA : **KURNIA ADI PERKASA**

A.3 ALAMAT : **JL. MARGOMULYO PERMAIAH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -**

A.4 NO. TELEPON : **0831-7482375** A.5 EMAIL : **kurniaadiperkasa@gmail.com**

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		17.805.663,00	356.113,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		17.805.663,00	356.113,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			356.113,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 **3** lembar

C.2  Surat Setoran Pajak/Bukti **3** lembar

C.3  Bukti Pemindahbukuan **0** lembar

C.4  Surat Kuasa Khusus **0** lembar

C.5  Fotokopi Surat Keterangan Bebas **0** lembar

C.6  Fotokopi Surat Keterangan Domisili **0** lembar

C.7  Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1  WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2  KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA : **KURNIAWAN CAHYADI**

D.4 NPWP : **06 788 078 1 605 000**


D.5 TANGGAL : **18 01 2022**

D.6 TEMPAT : **KOTA SURABAYA**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Lampiran : SPT Induk Masa Desember 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</b>		<b>FORMULIR 1724                  INDUK</b>	
	Masa Pajak (mm-yyyy) H.1 12 - 2021		area barcode	
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal		H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-		H.4
H.5		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (Disisi oleh petugas) 0		H.5

**A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

A.1 NPWP : 83 918 460 3 614 000

A.2 NAMA : KURNIA ADI PERKASA

A.3 ALAMAT : JL. MARGOMULYO PERMAIAH, ASEM ROWO, ASEM ROWO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, -

A.4 NO. TELEPON : 0831-7482375 A.5 EMAIL : kurniaadiperkasa@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	URAIAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DTP(Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh PASAL 23</b>				
1	DEVIDEN	24-101-01	0,00	0,00
2	BUNGA	24-102-01	0,00	0,00
3	ROYALTI	24-103-01	0,00	0,00
4	HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN LAINNYA	24-100-01	0,00	0,00
5	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	24-100-02	0,00	0,00
6				
	6a. JASA TEKNIK	24-104-01	0,00	0,00
	6b. JASA MANAJEMEN	24-104-02	0,00	0,00
	6c. JASA KONSULTAN	24-104-03	0,00	0,00
	6d. JASA LAIN SELAIN JASA YANG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21		17.805.663,00	356.113,00
7	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 6)		17.805.663,00	356.113,00
8	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 23 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			356.113,00
9	JUMLAH PPh PASAL 23 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00
<b>II. PPh PASAL 26</b>				
10	DEVIDEN	27-101-01	0,00	0,00
11	BUNGA	27-102-01	0,00	0,00
12	ROYALTI	27-103-01	0,00	0,00
13	SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA	27-100-01	0,00	0,00
14	IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN	27-104-01	0,00	0,00
15	HADIAH DAN PENGHARGAAN	27-100-02	0,00	0,00
16	PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA	27-100-03	0,00	0,00
17	PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA	27-102-02	0,00	0,00
18	KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG	27-100-04	0,00	0,00
19	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA	27-100-05	0,00	0,00
20	PREMI ASURANSI/ REASURANSI	27-100-06	0,00	0,00
21	PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM	27-100-07	0,00	0,00
22	PENGHASILAN KENA PAJAK BUT SETELAH PAJAK	27-105-01	0,00	0,00
23	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 10 S.D 22)		0,00	0,00
24	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SETELAH DIKURANGI PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)			0,00
25	JUMLAH PPh PASAL 26 YANG KURANG DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN BUKTI PEMOTONGAN			0,00

1) Tidak termasuk deviden kepada WP orang pribadi dalam negeri  
 2) Tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2)  
 3) Selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf a  
 4) Tidak termasuk sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)  
 5) Jenis jasa lain sebagaimana angka 6d diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan merupakan pengurangan dan kode objek pajak 24-104-04 sampai dengan 24-104-05 pada Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

C.1  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 3 lembar

C.2  Surat Setoran Pajak/Bukti 3 lembar

C.3  Bukti Pemindahbukuan 1 lembar

C.4  Surat Kuasa Khusus 1 lembar

C.5  Fotokopi Surat Keterangan Bebas 1 lembar

C.6  Fotokopi Surat Keterangan Domisili 1 lembar

C.7  Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

D.1  WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.2  KUASA WAJIB PAJAK

D.3 NAMA : KURNIAWAN CAHYADI

D.4 NPWP : 06 788 078 1 605 000

D.5 TANGGAL : 18 01 2022

D.6 TEMPAT : KOTA SURABAYA

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

Lampiran 13: Bukti Potong masa Januari 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN                  PPh PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000001 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan _____	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : 311830087125000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : MITRA SAMUDRA ABADI  
 A.4 Alamat : JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI  
 Kelurahan/Desa : SAMPALI Kecamatan : PERCUT SEI TUAN  
 Kota/Kabupaten : KAB. DELI SERDANG Provinsi : SUMATERA UTARA Kode Pos : \_\_\_\_\_  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
1-2021	24-104-40	17.900.000,00	0	2	358.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000001 Tanggal: 30-01-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : 839184603614000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : KURNIA ADI PERKASA  
 C.3 Tanggal : 19-02-2021  
 C.4 Nama Penandatangan : KURNIAWAN CAHYADI  
 C.5   
 3GGLP1L0  
 Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.  
 H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.  
 A.4 Disisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.  
 A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.  
 B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut.  
 24-100-01: Hasil penggantian bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02: Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01: Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01: Bunga tabak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01: Royalti.  
 24-104-01: Jasa Teknik.  
 24-104-02: Jasa Manajemen.  
 24-104-03: Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto  
 B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP  
 B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penentuan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta RUPS, Surat Penjualan, Tafsiran Norma dan tanggal dokumen referensi.  
 B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pembebasan DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Disisi Nama Wakil Paakai/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibuktikan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran : Bukti Potong masa Februari 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong                  Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak                  Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000002 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: SAMPALI Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Kota/Kabupaten	: KAB. DELI SERDANG Provinsi : SUMATERA UTARA Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2021	24-104-40	22.850.000,00	0	2	457.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000002 Tanggal: 28-02-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-03-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	



27YQ1UOY

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomorannya transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.  
 H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.000.000

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Disisi dengan alamat lengkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.

A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy

B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perdirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen tersebut.

B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**

C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.

C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kasus Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai sandaran e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran : Bukti Potong masa Mei 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
	H.1 NOMOR : 3300000006 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 029694460609000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: ARTHA SAMUDRA KONTINDO
A.4 Alamat	: KAWASAN INDUSTRI CIPTA GUNA JL ARTERI YOS SUDARSO
Kelurahan/Desa	: BANDARHARJO Kecamatan : SEMARANG UTARA
Kota/Kabupaten	: KOTA SEMARANG Provinsi : JAWA TENGAH Kode Pos : 70175
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2021	24-104-40	370.000,00	0	2	7.400,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000007 Tanggal: 31-05-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-06-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 ROSKISDU

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomorasi transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.

H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Disisi dengan alamat lengkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.

A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy

B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;

Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perdirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**


C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.

C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kasus Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai sandaran sbupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan pananda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000004 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: <u>SAMPALI</u> Kecamatan : <u>PERCUT SEI TUAN</u>
Kota/Kabupaten	: <u>KAB. DELI SERDANG</u> Provinsi : <u>SUMATERA UTARA</u> Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2021	24-104-40	17.468.750,00	0	2	349.375,00


B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000004 Tanggal: 31-05-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-06-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 H7X8VE2K

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.


H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikarenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensinya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Susut. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000004 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: <u>SAMPALI</u> Kecamatan : <u>PERCUT SEI TUAN</u>
Kota/Kabupaten	: <u>KAB. DELI SERDANG</u> Provinsi : <u>SUMATERA UTARA</u> Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
5-2021	24-104-40	17.468.750,00	0	2	349.375,00


B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000004 Tanggal: 31-05-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-06-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 H7X8VE2K

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensinya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman dan bukti. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran : Bukti Potong masa July 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong                  Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak                  Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000009 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 029694460609000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: ARTHA SAMUDRA KONTINDO
A.4 Alamat	: KAWASAN INDUSTRI CIPTA GUNA JL ARTERI YOS SUDARSO
Kelurahan/Desa	: BANDARHARJO Kecamatan : SEMARANG UTARA
Kota/Kabupaten	: KOTA SEMARANG Provinsi : JAWA TENGAH Kode Pos : 70175
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7-2021	24-104-40	370.000,00	0	2	7.400,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000009 Tanggal: 31-07-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-08-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	



612R9APX

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomor transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Disisi dengan alamat lengkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.

A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy

B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perdirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**


C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.

C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kasus Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai sandaran e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan pananda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000011 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 013964556058000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MULTI BINA PURA INTERNATIONAL
A.4 Alamat	: JALAN RAYA CAKUNG CILINCING KM.4, ROROTAN
Kelurahan/Desa	: ROROTAN Kecamatan : CILINCING
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 14140
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7-2021	24-104-40	430.001,00	0	2	8.600,00


B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000011 Tanggal: 31-07-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-08-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 92BWHJXW

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-0000000011.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.


H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan, Tuluskan nomor dan tanggal dokumen referensinya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman anti-suap. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong          Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak          Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000007 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: <u>SAMPALI</u> Kecamatan : <u>PERCUT SEI TUAN</u>
Kota/Kabupaten	: <u>KAB. DELI SERDANG</u> Provinsi : <u>SUMATERA UTARA</u> Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7-2021	24-104-40	17.468.750,00	0	2	349.375,00


B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000007 Tanggal: 31-07-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 09-08-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 6F22B2UO

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensinya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Susut. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran : Bukti Potong masa September 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong                  Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak                  Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000015 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 019797356518000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: SEDATI AGUNG ABADI
A.4 Alamat	: Jl. Lebdosari
Kelurahan/Desa	: KALIBANTENG KULON Kecamatan : SEMARANG BARAT
Kota/Kabupaten	: KOTA SEMARANG Provinsi : JAWA TENGAH Kode Pos : 50245
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2021	24-104-40	4.739.300,00	0	2	94.786,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000015 Tanggal: 30-09-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 08-10-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 JEVU36J

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.

H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.


H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disilakan dapat disesuaikan.  
 A.4 Disisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.  
 A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.  
 B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto  
 B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP  
 B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penentuan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan, Tuluskan nomor dan tanggal dokumen referensi.  
 B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.  
 C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kususa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000013 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	: _____
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: <u>SAMPALI</u> Kecamatan : <u>PERCUT SEI TUAN</u>
Kota/Kabupaten	: <u>KAB. DELI SERDANG</u> Provinsi : <u>SUMATERA UTARA</u> Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	: _____

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2021	24-104-40	12.640.306,00	0	2	252.806,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000013 Tanggal: 30-09-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 08-10-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	 TBJ7NUFE

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui urf pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.


H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikarenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap/sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Deviden tidak termasuk deviden kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen tersebut.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman transaksi. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung.  
 Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong          Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak          Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000014 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 013964556058000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MULTI BINA PURA INTERNATIONAL
A.4 Alamat	: JALAN RAYA CAKUNG CILINCING KM.4, ROROTAN
Kelurahan/Desa	: ROROTAN Kecamatan : CILINCING
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 14140
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2021	24-104-40	430.001,00	0	2	8.600,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000014 Tanggal: 30-09-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 08-10-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	 5JS351LW <small>Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.</small>

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.  
 H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini terdapat selain pengisian ini. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung.  
 Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran : Bukti Potong masa Oktober 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong                  Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak                  Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000017 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP : 013009923093000  
 A.2 NIK : \_\_\_\_\_  
 A.3 Nama : SUCOFINDO  
 A.4 Alamat : GRAHA SUCOFINDO, JL RAYA PASAR MINGGU  
 Kelurahan/Desa : PANCORAN Kecamatan : PANCORAN  
 Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 12780  
 A.5 No. Telepon : \_\_\_\_\_

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2021	24-104-63	2.072.650,00	0	2	41.453,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000017 Tanggal: 09-10-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP : 839184603614000  
 C.2 Nama Wajib Pajak : KURNIA ADI PERKASA  
 C.3 Tanggal : 04-11-2021  
 C.4 Nama Penandatangan : KURNIAWAN CAHYADI  
 C.5

  
 ABUZFUBI

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomor transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.  
 H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.  
 A.4 Disisi dengan alamat lengkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy  
 B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang tidak dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto  
 B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP  
 B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perdirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.  
 B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.  
 C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kasus Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai sandangan e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan pananda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).



Lampiran : Bukti Potong masa November 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> <small>Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong                  Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak                  Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak</small>
	H.1 NOMOR : 3300000020 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 019797356518000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: SEDATI AGUNG ABADI
A.4 Alamat	: Jl. Lebdosari
Kelurahan/Desa	: KALIBANTENG KULON Kecamatan : SEMARANG BARAT
Kota/Kabupaten	: KOTA SEMARANG Provinsi : JAWA TENGAH Kode Pos : 50245
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2021	24-104-40	4.633.700,00	0	2	92.674,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000020 Tanggal: 04-11-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 22-11-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	



CXBP4WE0

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomorannya transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disisakan dapat disesuaikan.

A.4 Disisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.

A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy

B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf a UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perindrihan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**


C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.

C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kasas Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai sandaran e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara menginduk melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan pananda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 330000022 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: <u>SAMPALI</u> Kecamatan : <u>PERCUT SEI TUAN</u>
Kota/Kabupaten	: <u>KAB. DELI SERDANG</u> Provinsi : <u>SUMATERA UTARA</u> Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2021	24-104-40	12.746.962,00	0	2	254.939,00


B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000019 Tanggal: 30-11-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 06-12-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 J3E5J0UE

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.


H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Runga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik;  
 24-104-02 Jasa Manajemen;  
 24-104-03 Jasa Konsultansi;  
 Kode Objek Pajak. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Perdiaran, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensinya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Susut. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000021 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 013964556058000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MULTI BINA PURA INTERNATIONAL
A.4 Alamat	: JALAN RAYA CAKUNG CILINCING KM.4, ROROTAN
Kelurahan/Desa	: ROROTAN Kecamatan : CILINCING
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 14140
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
11-2021	24-104-40	430.001,00	0	2	8.600,00


B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000021 Tanggal: 03-11-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 22-11-2021
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 ALJVF8WG

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor unit. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.  
 H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.  
 H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensinya.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Susut. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara mengindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran : Bukti Potong masa Desember 2021

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b> Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
H.1 NOMOR : 3300000025		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 013964556058000
A.2 NIK	:
A.3 Nama	: MULTI BINA PURA INTERNATIONAL
A.4 Alamat	: JALAN RAYA CAKUNG CILINCING KM.4, ROROTAN
Kelurahan/Desa	: ROROTAN Kecamatan : CILINCING
Kota/Kabupaten	: KOTA ADM. JAKARTA Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 14140
A.5 No. Telepon	:

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

Masa Pajak (mm-yyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2021	24-104-40	430.001,00	0	2	8.600,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000024 Tanggal: 31-12-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 10-01-2022
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	

  
 SLT6ST2B

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**II. Bagian Header Formulir**

H.1 Disisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.

H.2 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**

Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP

A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan 00.000.000.0-000.000

A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

A.3 Disisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang disilakan dapat disesuaikan.

A.4 Disisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi Kode Pos.

A.5 Disisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Disisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy

B.2 Disisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

24-100-01 Hadiah, penghasilan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.

24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.

24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).

24-103-01 Royalti

24-104-01 Jasa Teknik;

24-104-02 Jasa Manajemen;

24-104-03 Jasa Konsultansi;

Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III

B.3 Disisi dengan jumlah penghasilan bruto

B.4 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP

B.5 Disisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.

B.6 Disisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Disisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan, Tindakan, nomor dan tanggal dokumen penerbitan.

B.8 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.

B.9 Disisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pembebasan DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

**C. Identitas Pemotong Pajak**


C.1 Disisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

C.2 Disisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Disisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyy.

C.4 Disisi Nama Wajib Pajak/wali Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.

C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus ditunjukkan tanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak	
H.1 NOMOR : 3300000024		
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan		

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 019797356518000	
A.2 NIK	: _____	
A.3 Nama	: SEDATI AGUNG ABADI	
A.4 Alamat	: Jl. Lebdosari	
Kelurahan/Desa	: KALIBANTENG KULON	Kecamatan : SEMARANG BARAT
Kota/Kabupaten	: KOTA SEMARANG	Provinsi : JAWA TENGAH
A.5 No. Telepon	: _____	Kode Pos : 50245

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2021	24-104-40	5.133.700,00	0	2	102.674,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000023 Tanggal: 31-12-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 10-01-2022
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	 6HUFU3N1

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.


**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikarenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**

B.1 Diisi dengan masa tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III.  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh: tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta Pendirian, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen tersebut.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**

C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kususa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman transaksi. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>BUKTI PEMOTONGAN</b> <b>PPH PASAL 23</b>	<b>FORM 1724 - III</b>
	H.1 NOMOR : 3300000023 H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- _____ H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong  
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak  
 Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG**

A.1 NPWP	: 311830087125000
A.2 NIK	: _____
A.3 Nama	: MITRA SAMUDRA ABADI
A.4 Alamat	: JALAN BERJAYA KOMPLEK CEMARA ASRI
Kelurahan/Desa	: <u>SAMPALI</u> Kecamatan : <u>PERCUT SEI TUAN</u>
Kota/Kabupaten	: <u>KAB. DELI SERDANG</u> Provinsi : <u>SUMATERA UTARA</u> Kode Pos : _____
A.5 No. Telepon	: _____

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG**


Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
12-2021	24-104-40	12.241.962,00	0	2	244.839,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen Invoice  
 Nomor Dokumen 31-00000022 Tanggal: 31-12-2021

B.8  PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas(SKB). Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

B.9  PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah(DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_  
 SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

C.1 NPWP	: 839184603614000
C.2 Nama Wajib Pajak	: KURNIA ADI PERKASA
C.3 Tanggal	: 10-01-2022
C.4 Nama Penandatanganan	: KURNIAWAN CAHYADI
C.5	 6W3F37PO

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui urf pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

**Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23**

**H. Bagian Header Formulir**

H.1 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sebanyak 10 digit dimana 2 digit kode Bukti Pemotongan 31 dan 8 digit nomor urut. Contoh: penomoran transaksi dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik pertama ter-generate 31-000000001.  
 Nomor Bukti Pemotongan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan.

H.2 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan pembatalan.

**A. Identitas Wajib Pajak yang Dipotong**  
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.  
 Penerbitan Bukti Pemotongan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dikenakan Pasal 39A UU KUP.  
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP wajib pajak yang dipotong. Dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0-000.000'.  
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan(NIK) dalam hal wajib pajak yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 A.3 Diisi dengan nama wajib pajak yang dipotong sesuai dengan kartu NPWP. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.  
 A.4 Diisi dengan alamat lengkapsebenarnya dari wajib pajak yang dipotong: Jalan,RT/RW,Kelurahan/Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten,Provinsi,Kode Pos.  
 A.5 Diisi dengan nomor telepon wajib pajak yang dipotong.

**B. Pajak Penghasilan yang Dipotong**  
 B.1 Diisi dengan masa tahun pajak saat terutang PPh Pasal 23, dengan format penulisan mm-yyy.  
 B.2 Diisi sesuai kode objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:  
 24-100-01 Hadiah penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat(1) huruf e UU PPh.  
 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat(2) UU PPh.  
 24-101-01 Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.  
 24-102-01 Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh pasal 4 ayat(2).  
 24-103-01 Royalti.  
 24-104-01 Jasa Teknik.  
 24-104-02 Jasa Manajemen.  
 24-104-03 Jasa Konsultansi.  
 Kode Objek Pajak Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat dilihat pada petunjuk detail Formulir 1724-III  
 B.3 Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
 B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.  
 B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh Pasal 23. Contoh : tarif atas jasa teknik adalah 2% diisi dengan angka 2.  
 B.6 Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang, termasuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.  
 B.7 Diisi dengan Dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen tersebut.  
 B.8 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 yang dipotong dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas. Tuliskan Nomor dan tanggal SKB.  
 B.9 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 23 ditanggung pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

**C. Identitas Pemotong Pajak**  
 C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.  
 C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.  
 C.3 Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.  
 C.4 Diisi Nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kusasa Wajib Pajak.  
 C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman transaksi. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemerintah (DTP) harus dibubuhkan peranda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).

Lampiran 14: Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Januari – Desember 2021

	<p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>														
<p><b>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</b></p>															
<p>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 43603207136213196120</p>															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">NPWP</td><td>:839184603614000</td></tr> <tr><td>Nama</td><td>:KURNIA ADI PERKASA</td></tr> <tr><td>Jenis Pajak</td><td>:PPH2326</td></tr> <tr><td>Pembetulan Ke-</td><td>:0</td></tr> <tr><td>Tanggal Terima</td><td>:19-02-2021</td></tr> <tr><td>Tahun Pajak</td><td>:2021</td></tr> <tr><td>Masa Pajak</td><td>:1</td></tr> </table>	NPWP	:839184603614000	Nama	:KURNIA ADI PERKASA	Jenis Pajak	:PPH2326	Pembetulan Ke-	:0	Tanggal Terima	:19-02-2021	Tahun Pajak	:2021	Masa Pajak	:1	<p>QR Code</p>  <p>YUSAOPOQ</p>
NPWP	:839184603614000														
Nama	:KURNIA ADI PERKASA														
Jenis Pajak	:PPH2326														
Pembetulan Ke-	:0														
Tanggal Terima	:19-02-2021														
Tahun Pajak	:2021														
Masa Pajak	:1														
<p>Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda</p>															

	<p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b></p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>														
<p><b>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</b></p>															
<p>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 52603307128213194412</p>															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">NPWP</td><td>:839184603614000</td></tr> <tr><td>Nama</td><td>:KURNIA ADI PERKASA</td></tr> <tr><td>Jenis Pajak</td><td>:PPH2326</td></tr> <tr><td>Pembetulan Ke-</td><td>:0</td></tr> <tr><td>Tanggal Terima</td><td>:19-03-2021</td></tr> <tr><td>Tahun Pajak</td><td>:2021</td></tr> <tr><td>Masa Pajak</td><td>:2</td></tr> </table>	NPWP	:839184603614000	Nama	:KURNIA ADI PERKASA	Jenis Pajak	:PPH2326	Pembetulan Ke-	:0	Tanggal Terima	:19-03-2021	Tahun Pajak	:2021	Masa Pajak	:2	<p>QR Code</p>  <p>U597ORS9</p>
NPWP	:839184603614000														
Nama	:KURNIA ADI PERKASA														
Jenis Pajak	:PPH2326														
Pembetulan Ke-	:0														
Tanggal Terima	:19-03-2021														
Tahun Pajak	:2021														
Masa Pajak	:2														
<p>Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda</p>															



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 30603607122213171017

NPWP : 839184603614000  
Nama : KURNIA ADI PERKASA  
Jenis Pajak : PPH2326  
Pembetulan Ke- : 0  
Tanggal Terima : 17-06-2021  
Tahun Pajak : 2021  
Masa Pajak : 5

QR Code



CGK5PEON

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 23603807148213131116

NPWP : 839184603614000  
Nama : KURNIA ADI PERKASA  
Jenis Pajak : PPH2326  
Pembetulan Ke- : 0  
Tanggal Terima : 13-08-2021  
Tahun Pajak : 2021  
Masa Pajak : 7

QR Code



GSKQ31T2

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 32603017174213118415

NPWP :839184603614000  
Nama :KURNIA ADI PERKASA  
Jenis Pajak :PPH2326  
Pembetulan Ke- :0  
Tanggal Terima :11-10-2021  
Tahun Pajak :2021  
Masa Pajak :9

QR Code



ZFUBPQUY

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 25603117151213171208

NPWP :839184603614000  
Nama :KURNIA ADI PERKASA  
Jenis Pajak :PPH2326  
Pembetulan Ke- :0  
Tanggal Terima :17-11-2021  
Tahun Pajak :2021  
Masa Pajak :10

QR Code



ZRZUF0R2

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 80603217116213166210

NPWP :839184603614000  
Nama :KURNIA ADI PERKASA  
Jenis Pajak :PPH2326  
Pembetulan Ke- :0  
Tanggal Terima :16-12-2021  
Tahun Pajak :2021  
Masa Pajak :11

QR Code



PMSLJSVM

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 15603107191223181113

NPWP :839184603614000  
Nama :KURNIA ADI PERKASA  
Jenis Pajak :PPH2326  
Pembetulan Ke- :0  
Tanggal Terima :18-01-2022  
Tahun Pajak :2021  
Masa Pajak :12

QR Code



TAQPZERY

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda